



## JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

### Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Erika Florida Damiani Ngasi<sup>1</sup>, Eki Darmawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, [2005010030@student.umrah.ac.id](mailto:2005010030@student.umrah.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, [ekidarmawan@umrah.ac.id](mailto:ekidarmawan@umrah.ac.id)

Corresponding Author: [2005010030@student.umrah.ac.id](mailto:2005010030@student.umrah.ac.id)

**Abstract:** *Tanjungpinang City and Bintan Regency are regions in the Riau Islands which are also popular tourist destinations due to their abundant natural resources. However, there are several policy constraints in promoting these two tourist destinations in each respective region. Tourism development needs to consider the economy of a region to meet good Regional Revenue Budget. Therefore, policy integration becomes a solution to the overlapping policies between the two regions in achieving the common goals of promoting and marketing Creative Economy in the Riau Islands. The aim of this study is to analyze the extent to which the integration of regional government policies in the development of tourism in Tanjungpinang City and Bintan Regency has been achieved. This article uses a qualitative research approach where data findings from observations or primary data as well as secondary data such as interviews and scientific journal articles are interpreted from the researcher's perspective. The lack of connectivity between the two regions is attributed to the failure to achieve the goals of the medium-term regional development plan and the lack of connectivity between the regions in both infrastructure and marketing their tourism packages. The hope is to achieve synchronization between the tourism policies taken by the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments and close cooperation between local governments, the private sector, and local communities through collaboration between the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments.*

**Keyword:** *Policy Integration, Tourism, Economic Development.*

**Abstrak:** Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan wilayah di Kepulauan Riau yang juga merupakan daerah yang diminati wisatawan karena potensi alam nya yang melimpah. Maka dalam mempromosikan kedua destinasi wisata tersebut terdapat beberapa kendala kebijakan di masing masing wilayah. Pembangunan wisata perlu memperhatikan perekonomian suatu daerah guna memenuhi Anggaran Pendapatan Daerah yang baik. Oleh karena itu, integrasi kebijakan menjadi solusi atas tumpang tindih antara dua kebijakan tersebut guna tercapainya sasaran dan tujuan bersama promosi dan pemasaran Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana integrasi kebijakan Pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Kota Tanjungpinang

dan Kabupaten Bintan telah tercapai. Artikel ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dimana data-data temuan baik dari hasil observasi atau data primer maupun data sekunder yakni wawancara dan artikel jurnal ilmiah yang diinterpretasi berdasarkan sudut pandang peneliti. penyebab kurangnya keterkaitan antara kedua wilayah tersebut adalah karena tidak tercapainya sasaran dan tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kurangnya konektivitas antara masing masing daerah baik dalam infrastruktur maupun dalam memasarkan paket wisatanya. Harapannya agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan pariwisata yang diambil oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan serta terjadinya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Tanjungpinang Kabupaten Bintan.

**Kata Kunci:** Integrasi Kebijakan, Pariwisata, Pembangunan Ekonomi.

---

## PENDAHULUAN

Kondisi pariwisata dewasa ini memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. (Riani, 2021) Proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah di Indonesia pada prinsipnya dapat ditunjang Pariwisata merupakan fenomena yang saat ini sedang populer untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa Negara dari non migas, karena industry pariwisata relatif tidak menimbulkan polusi atau pun kerusakan lingkungan. (Suryani, 2017) Upaya pembangunan sektor pariwisata melibatkan seluruh masyarakat, disamping penyelenggara Negara dan swasta. Meskipun sudah banyak pelaksanaan dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta (Kalebos, 2016). Dengan pariwisata, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Ini berarti untuk tercapainya keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya dukungan kesadaran dedikasi serta loyalitas dari segenap masyarakat Pengertian oleh potensi wisata yang dimilikinya dengan pembangunan yang sangat dinamis selama beberapa dekade terakhir, Situasi ini berdampak pada perekonomian nasional dan meningkatkan devisa Negara. Provinsi Kepulauan Riau mencatat 758.154 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022. Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang wisatawan yang penting di Indonesia selain Provinsi Bali dan Jakarta karena letak geografis Kepulauan Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Dwiputra, 2013).

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2022 sekitar 264.350 orang, sedangkan di tahun 2021 mencapai 89.649 orang, dengan demikian mengalami pertumbuhan sekitar 174,79% dari tahun sebelumnya atau kenaikan sebesar 156.701 orang. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya 2019 kunjungan Wisatawan Mancanegara mencapai 169.364, tahun 2020 menurun menjadi 22.115 dan tahun 2021 menurun Kembali menjadi 154 orang. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 terdapat pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, sehingga tidak terjadi Mobilitas Pariwisata. Bila dilihat dari target pencapaian kunjungan wisatawan Mancanegara 148.500 orang dan realisasi kunjungan hanya mencapai 25.558 orang sehingga pencapaian realisasi kinerja hanya mencapai 17,21%. Sedangkan jika kita

bandingkan dengan target Kunjungan mancanegara propinsi Kepulauan Riau sebesar 370.500, Kota Tanjungpinang menyumbang 6,89%. Dibawah Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

Pariwisata merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses perkembangannya juga mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial dan ekonomi masyarakat (Wibowo et, al 2017). Pengembangan sektor pariwisata melalui Promosi dan Pemasaran telah menjadi fokus utama sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif guna memperluas lapangan pekerjaan. Menurut Indrianeu et al. (2021). Potensi wisata dapat berupa wisata belanja, wisata alam, wisata buatan, wisata peninggalan budaya (cultural artefak), wisata pertunjukan seni budaya (cultural behavior), maupun wisata religi. Potensi wisata Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang adalah dua lokasi yang saling berdekatan di Kepulauan Riau, Indonesia, dan keduanya memiliki daya tarik unik yang dapat menjadi pilihan menarik bagi para wisatawan. Kabupaten Bintan dikenal sebagai pulau yang menggabungkan pesona alam dengan fasilitas resor mewah. Dengan pantai-pantai indah, lapangan golf yang terkenal, dan kehidupan bawah laut yang spektakuler, Bintan adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang mencari liburan santai dan aktif.

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas (Purnomo 2016). Melalui dua wilayah dalam satu daratan yang masing masing memiliki cara tersendiri dalam mempromosikan dan memasarkan paket wisatanya akan tetapi paket wisata di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih belum terintegritas dengan baik dimana paket-paket wisata yang ada di kabupaten Bintan tidak terhubung ke destinasi wisata kota Tanjungpinang begitupun sebaliknya. Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, meyakinkan dan meningkatkan dan kembali produk sasaran pembeli dengan harapan mereka tergerak hatinya dan secara sukarela membeli produk (Muhammad, H. S. (2020). Kabupaten Bintan yang merupakan satu wilayah dengan kota Tanjungpinang juga dikenal dengan pesona pantainya yang indah dengan pasir putih yang menawan.

Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan, karena setiap perusahaan ingin terus bertahan dan terus berkembang. Tetapi sering sekali masyarakat awam berpendapat bahwa pemasaran memiliki pengertian yang sama dengan penjualan. Pandangan seperti ini perlu dirubah, karena penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarnya, serta bagaimana memuaskan mereka (sumastawa, 2016).

Selain itu dalam perkembangan mempromosikan produk ekonomi kreatif masih terdapat beberapa kendala dalam mempromosikan produk tersebut antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Banyak kasus, pengembangan pariwisata melibatkan berbagai aspek, termasuk perizinan, perencanaan, infrastruktur, dan promosi. Perbedaan wilayah administratif bisa menyebabkan berbagai pihak bertanggung jawab atas aspek-aspek ini, dan kurangnya koordinasi antara mereka dapat menghambat pengembangan yang terpadu. Kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal adalah kebijakan di bidang pariwisata yang mengedepankan segala bentuk keunikan yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah tertentu yang mengandung nilai-nilai kebudayaan baik yang bersifat material maupun non-material (Jupir, M. M. 2013). Kebijakan pariwisata yang tidak terintegrasi yaitu promosi dan pemasaran, serta kebijakan ekonomi kreatif. Dimana promosi paket tour wisatawan di kabupaten bintan tidak dipadukan dengan destinasi kota Tanjungpinang.

Tujuan utama dari Tourism Linkages Networking adalah untuk meningkatkan penggunaan barang dan layanan yang dapat diperoleh dengan cara bersaing dari sumber lokal. Menurut Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Sasaran RPJMD yang merupakan Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi kepulauan Riau yaitu Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dengan Indikator Sasaran adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan dan menstabilkan ekonomi kreatif baik Nusantara dan Mancanegara. Sejalan dengan RPJMD Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang juga menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata guna mencapai koneksi kerja sama yang dinamis bersama dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bintan telah dirancang untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata di pulau Bintan, yang dikenal dengan keindahan pantainya, fasilitas perhotelan yang berkualitas, dan berbagai kegiatan rekreasi. Namun dalam pengembangan masih terdapat beberapa Permasalahan atau isu strategis Dinas Kebudayaan secara umum. Hal Ini disebabkan kurangnya konektivitas antara kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Terlebih lagi dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 kembali menurun menjadi 3 kali pada tahun 2020. Untuk mengatasi masalah ketidakintegrasian kebijakan dalam sektor pariwisata, diperlukan upaya kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Mereka harus berusaha untuk merumuskan kebijakan yang lebih terpadu, berbagi sumber daya dan informasi, serta mengkoordinasikan upaya pengembangan pariwisata agar bisa mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi kedua wilayah.

Instrumen kebijakan harus koheren dalam desainnya dan implementasi kebijakan ini membutuhkan instrumen yang menyamakan persamaan pemahaman dari integrasi kebijakan (Cejudo et.al., 2021). Sedangkan dalam penelitian B. Guy Peters (2018) dijelaskan bahwa Integrasi kebijakan adalah proses menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian untuk mencapai integrasi kebijakan yang efektif dalam sektor pariwisata, maka penulis menggunakan 4 konsep dimensi integrasi kebijakan menurut Jeroen J.L. Candel dan Robbert Biesbroek (2016). Untuk memastikan integrasi kebijakan di Bintan dan Tanjungpinang berjalan dengan baik dan tidak hanya bersifat evaluatif dan konseptual saja, tetapi juga memberikan dampak dan secara praktik menjadi efektif, penulis akan menganalisis hasil data lapangan dengan framework Candel dan Biesbroek dengan konsep 4 dimensi yang mereka utarakan yaitu:

1. Policy stream Menurut Kingdon, J. W (2014) adalah mencakup berbagai usulan kebijakan, konsep, dan solusi yang tersedia dalam dunia kebijakan yang akan dilihat adalah pada pergulatan antar aktor dalam hal diskusi, perdebatan serta perumusan kebijakan promosi Tanjungpinang dan Bintan hingga pemasaran wisata Ekonomi kreatif.
2. Subsystem involvement akan merujuk pada seberapa banyak berbagai pihak dan kelompok terlibat dalam subsistem pariwisata.
3. Policy goals digunakan untuk melihat sejauh mana antar aktor memiliki tujuan yang sama untuk meingtegrasikan dan meningkatkan kebijakan promosi dan pemasaran Ekonomi kreatif bersama.
4. Policy instrument yang akan dilihat adalah pada alat-alat atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan bersama seperti promosi atau pemasaran ekonomi kreatif dan regulasi lingkungan yang dijalankan bersama di Bintan dan Tanjungpinang.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus mempelajari bagaimana mengintegrasikan kebijakan promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pada sektor pariwisata Kota Tanjungpinang dan Provinsi Bintan. Penulis juga berharap agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan pariwisata yang diambil oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan serta terjadinya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

## METODE

Artikel ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut (Fadli, 2021) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Dimana datadata temuan baik dari hasil observasi atau data primer maupun data sekunder yakni wawancara dan artikel jurnal ilmiah yang diinterpretasi berdasarkan sudut pandang peneliti. Sumber data primer adalah Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kepulauan Riau, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Tanjungpinang dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan Pelaku usaha. Pencarian data menggunakan metode wawancara mendalam mengingat penanganan kebijakan pariwisata tidak terpusat di satu daerah saja. Pada artikel ini, penulis akan menggabungkan hasil wawancara mendalam dan data sekunder untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di daerah Kepulauan Riau yang diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam dan relevan dalam penelitian riset ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau mencatat 758.154 kunjungan wisatawan mancanegara. Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang wisatawan yang penting di Indonesia selain Provinsi Bali dan Jakarta karena letak geografis kepulauan riau yang strategis, berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan terletak pada jalur perdagangan internasional. Kedekatan ini mendukung konektivitas regional dan investasi asing di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dalam rangka menjaga relevansi program ini, pemerintah harus melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan konsep yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut, guna memajukan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut dengan Rencana Induk Pembangunan Daerah. Hal ini menjadi destinasi populer bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan singkat di Indonesia.

**Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan 5 Tahun Terakhir**

Pintu masuk	Jumlah				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	2.635.004	2.864.795	411.248	3.103	758.184
Bintan	522.399	634.735	64.234	283	137.529
Tanjungpinang	140.603	169.364	18.700	154	25.558

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan daerah dari sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup drastis. Selama periode tahun 2018-2022, Pada tahun 2018 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan sebesar 522.399 Dan Kota Tanjungpinang yang merupakan satu daratan dengan kabupaten bintan sebesar 140.603 Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan menjadi 634.735 dan 169.364 kunjungan. Sektor pariwisata dapat dianggap sebagai salah satu "domain kebijakan" atau "sektor kebijakan" yang berpartisipasi dalam proses integrasi kebijakan.

Hal ini merupakan pengaruh dari Proses pengembangan kawasan desa wisata yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2008, yang mengatur penyerahan wewenang kepada pemerintahan desa. Ini berarti bahwa pemerintah desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat desa, bertanggung jawab untuk mengelola potensi wisata di wilayah mereka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Kabupaten Bintan tahun 20112031. Kawasan yang diidentifikasi sebagai Desa Wisata mencakup kawasan di Kawal, Teluk Bakau, Sebung Perih, Sei Kecil, Sebung Lagoi, Berakit, Bintan Berkapur, dan Malang Rapat.

Begitu juga dengan Kota Tanjungpinang Pelaksanaan RIPPARKOT diwujudkan dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan perkembangan Pemerintah Daerah. Program pembangunan kepariwisataan Kota dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah lainnya, swasta dan masyarakat.

### **Policy Stream (Arus Kebijakan)**

Arus kebijakan dalam upaya kolaboratif industri pariwisata seringkali melibatkan sejumlah pihak, dari asosiasi pariwisata hingga keterlibatan pemerintah dalam mengatur regulasi. Namun, penting untuk memahami perbedaan antara pemasaran dan promosi. Pemasaran melibatkan aktivitas selling dan transaksi, sementara promosi lebih fokus pada mempromosikan tanpa jaminan terjadinya penjualan atau transaksi. Konektivitas antara destinasi wisata seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang melibatkan asosiasi pariwisata yang menjual pakatnya, bukan pemerintah yang melakukan penjualan langsung. Pentingnya integrasi terjadi melalui pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama:

1. Pemerintah
2. Akademisi
3. Pihak swasta (pengusaha)
- 4) Komunitas dan
- 5) Media.

Peran pemerintah terkait dengan regulasi dan aturan yang membentuk landasan bagi industri pariwisata. Investasi untuk pembangunan destinasi pariwisata biasanya berasal dari sektor swasta, sementara akademisi melakukan penelitian, termasuk studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. Asosiasi pariwisata dan media bertanggung jawab atas promosi yang besar-besaran. Pemerintah memegang peran penting dalam pentahelix karena regulasi yang harus dibuat untuk mengatur industri pariwisata. Implementasi kerjasama antara Dinas Pariwisata Tanjung Pinang dan Dinas Pariwisata Bintan terjadi dengan fokus pada destinasi unggulan seperti NPM Marina dan Geopark, di mana penentuan destinasi unggulan bergantung pada pemahaman mereka yang memiliki destinasi tersebut.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budayadi daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat penting, karena Memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat dan Mengatur peran setiap stakeholders terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu (Puradinata, 2023). Terkait dengan implementasi kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Kepulauan Riau, terdapat sejumlah hambatan yang mengemuka. Salah satunya adalah divergensi dalam kebijakan antara kabupaten/kota yang secara langsung mempengaruhi kapasitas pihak provinsi untuk melakukan intervensi. Hal ini berakar pada prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang, di mana setiap entitas daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokalnya sendiri. Fenomena ini tercermin dalam perumusan rencana strategis (Renstra) yang disusun oleh setiap kabupaten/kota, yang kemudian menjadi dasar bagi pembuatan regulasi lokal.

Kota Tanjungpinang masih menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 hanya sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya sebesar -3,45% pada tahun 2020. Inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 0,86%, sedangkan inflasi tahunan (yoy) November 2022 sebesar 4,50%.

Kedepan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya tinggi tetapi juga mampu menurunkan kesenjangan pendapatan penduduk dan mampu mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan didukung sektor-sektor ekonomi utama Kota Tanjungpinang yaitu sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata, dan usaha mikro dan kecil. Hal ini menjadi catatan bahwa belum optimalnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai penggerak perekonomian daerah.

**Tabel 2. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi perangkat daerah	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dipromosikan	408,00	160,00	160,00	196,00
2.	PAD Sektor Pariwisata	110,26	69,38	74,12	86,38

(Sumber: Disbudpar Dokumen RENSTRA 2024-2026)

Berdasarkan tabel 2, dapat kita ketahui adanya Pada Tahun 2022 target subsektor ekonomi kreatif dan Pendapatan Asli daerah tidak tercapai, berbanding jauh terhadap tahun 2019 yang merupakan capaian tertinggi baik itu target tujuan, sasaran maupun program. Hal ini disebabkan Adanya Corona Virus yang menyerang seluruh negara di dunia, Selanjutnya pada 2022 jumlah capaian di kabupaten bintan dan kota tanjungpinang kembali mengalami peningkatan namun tidak signifikan karena jumlah kunjungan wisatawan asing menurun. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, capaian positif dapat ditemukan dalam periode sebelumnya. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, yang menjadi indikator vital dalam mengevaluasi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian lokal. Meskipun kondisi ekonomi pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh pandemi, fakta bahwa PAD sektor pariwisata berhasil meningkat selama periode 2018-2019 memberikan indikasi positif. Ini juga menunjukkan ketahanan sektor pariwisata terhadap ketidakpastian ekonomi, sekaligus potensi pemulihan pada masa mendatang seiring dengan penanganan pandemi.

Sandiaga Uno dalam nasional Kompas mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, yang telah memberikan dukungan kepada ratusan pelaku ekonomi kreatif melalui workshop Kabupaten Kreatif. (Safitri, 2021). Menyoroti prestasi Bintan, Sandiaga Uno menjelaskan bahwa kini daerah tersebut telah meraih posisi sebagai salah satu destinasi teratas bagi wisatawan mancanegara di Indonesia agar Kepulauan Riau mampu menghasilkan produk ekonomi kreatif yang tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Oleh karena itu target pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan sektor pariwisata sangat penting terhadap perkembangan pemasaran ekonomi kreatif dengan cara meningkatkan jumlah minat konsumsi barang. Terdapat dua perbandingan antara ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang tidak seimbang menyebabkan tidak tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Sasaran RPJMD yang merupakan Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi kepulauan Riau yaitu Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dengan Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dan menstabilkan ekonomi kreatif baik Nusantara dan Mancanegara. Maka RPJMD Kepulauan Riau mengamanatkan Target pembangunan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau yaitu:

1. Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata
2. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
3. Mewujudkan pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel.

4. Tercapainya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata Sejalan dengan RPJMD Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata juga menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataana guna mencapai koneksi kerja sama yang dinamis, sebagai berikut;
  - a. Memajukan daya tarik pada destinasi pariwisata sesuai standar pelayanan pariwisata, meliputi daya tarik alam, buatan, sejarah dan budaya, belanja dan kuliner
  - b. Menyempurnakan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana serta aksesibilitas wisata yang berkualitas.
  - c. Memajukan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil pendukung pariwisata.
  - d. Mencapai peningkatan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana serta aksesibilitas wisata yang berkualitas yaitu meningkatnya kemudahan akses wisatawan ke destinasi wisata
  - e. Mencapai peningkatan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata yang menjangkau seluruh pasar wisatawan

Hal ini sesuai dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dilakukan dengan merujuk pada Pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun tahapan yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD mencakup: Perencanaan awal RPJMD melibatkan tahap perumusan rencana awal, melalui proses konsultasi publik untuk menggali aspirasi pemangku kepentingan terkait substansi RPJMD, serta mencapai kesepakatan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan DPRD. Sedangkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataana Kabupaten Bintan telah dirancang untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata di pulau Bintan, yang dikenal dengan keindahan pantainya. Pelaksanaan kegiatan terkait pariwisata di tingkat kabupaten didasarkan pada UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup:

1. Pelaksanaan atraksi wisata di kabupaten/kota
2. Pemeliharaan daerah strategis pariwisata di tingkat kabupaten/kota
3. Pemeliharaan tujuan pariwisata di kabupaten/kota, penentuan tanda pendaftaran bisnis pariwisata, pemasaran pariwisata domestik dan internasional untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan daerah strategis pariwisata di tingkat kabupaten/kota. Namun dalam pengembangan masih terdapat beberapa Permasalahan atau isu strategis Dinas Kebudayaan secara umum adalah sebagai berikut:
  - a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan antara Tanjungpinang dan
  - b. Bintan.
  - c. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah di Kota Tanjungpinang.
  - d. Sarana dan prasarana saat ini belum mencapai tingkat optimal karena adanya keterbatasan dalam beberapa aspek. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecukupan infrastruktur internet, standar yang belum terpenuhi dalam infrastruktur gedung pertunjukan, biaya tinggi untuk mesin produksi, keterbatasan perangkat lunak untuk menghasilkan produk dan jasa kreatif, kurangnya kegiatan riset konten, serta minimnya aktivitas pengarsipan konten.
  - e. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif Permasalahan ini terutama disebabkan belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang



fluktuatif, dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal Pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Hal Ini disebabkan kurangnya konektivitas antara kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang terlebih lagi dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 210 kembali menurun menjadi 3 kali pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3. Target Indikator Kinerja Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Objek	26	29	58	67	67	Urusan Indikator
2.	Total promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif	Kali	10	12	14	10	3	Urusan Indikator
3.	Total jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	37	10	31	70	70	
4.	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata	Orang	600	1.24 5	1.24 5	1.52 2	1.52 2	Urusan Indikator
5.	Total kemitraan pengembangan pariwisata	Kemitraan	385	408	413	418	418	Urusan Indikator
6.	Proporsi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Persen	15	17	20	-45	-89	IKK
7.	Perbandingan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke -	Persen	7	9,3	10,3	-34	-73	IKK

(Sumber: Disbudpar Dokumen Bintan Tahun 2021)

Capaian RPJMD bidang pariwisata pada 2020 sangat baik. dari empat program dan enam indikator yang dijadikan ukuran, terdapat satu indikator dengan tingkat pencapaian tujuan kurang dari 100% yang belum tercapai, dan lima indikator telah mencapai tujuan tahun 2020 dengan tingkat pencapaian tujuan di atas 100 % dapat lihat Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 adalah banyaknya desa yang menjadi desa wisata. Sementara itu, pencapaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 meliputi lima indikator dengan kategori “pencapaian sangat tinggi” dan satu indikator dengan kategori “pencapaian sedang”.

Jauhnya pencapaian dari target Kunjungan karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat merubah target kinerja karena tidak berubahnya RPJMD Kepulauan Riau, Tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021 makan Tahun 2022 kunjungan wisatawan

Mancanegara sudah mulai meningkat tajam. Dikarenakan mulai dibukanya Pintu masuk bagi kedatangan Wisatawan Mancanegara. Hal ini merupakan salah satu potensi yang harus perhatikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan agar terus meningkatkan daya tarik wisata Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan guna menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, penting juga untuk terus memantau perkembangan sektor pariwisata dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

Permasalahan lain mungkin juga meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM yang terlatih di sektor pariwisata, atau bahkan perbedaan fokus dalam mengembangkan destinasi wisata. Hal ini dapat membuat proses pelaksanaan program menjadi terhambat dan menghambat pencapaian tujuan dalam pengembangan pariwisata di Tanjung Pinang dan Bintan. Salah satu permasalahan konkret yang muncul akibat diversifikasi kebijakan adalah terkait dengan kebijakan visa on arrival (VoA). Sebelumnya, fasilitas ini diberikan secara

cuma-cuma kepada wisatawan. Namun, seiring waktu, perubahan kebijakan mewajibkan wisatawan membayar biaya visa, yang berpotensi memberatkan para pelancong. Pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang dan kabupaten Bintan, sebagai daerah wisata, menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah ini. Kendati demikian, kendala yang mereka hadapi tidak dapat diatasi secara lokal, mengingat hal ini merupakan urusan pemerintah pusat yang bersifat bilateral (government-to-government). Proses penyelesaian masalah ini menjadi semakin rumit karena melibatkan laporan kepada pemerintah pusat yang kemudian harus berkoordinasi dengan pemerintah negara mitra terkait. Hingga saat ini, kendala terkait kebijakan visa tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Hal ini menyoroti kebutuhan akan intervensi dari tingkat provinsi, yang memiliki peran penting sebagai mediator antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Meski begitu, perlu diingat bahwa keterlibatan setiap provinsi dalam menyelesaikan permasalahan ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait tugas DPRD provinsi dan alokasi sumber daya mereka.

### **Subsystem involvement (Keterlibatan Subsystem)**

#### **1. Analisa Implementasi dengan Policy Integration Toward a Processual Understanding of Policy Integration**

Tanjung Pinang dan Bintan dalam mengintegrasikan kebijakan industri pariwisatanya menghadapi sejumlah permasalahan yang melibatkan aktor-aktor beragam. Mari kita telaah lebih mendalam di setiap aliran teori Kingdon dan bagaimana konteks lokal di kedua wilayah ini memainkan peran penting dalam proses integrasi kebijakan.

##### **a. Aliran Masalah (*Stream of Problems*)**

Di wilayah ini, identifikasi masalah dalam industri pariwisata mencakup sejumlah aspek penting. Salah satu contoh masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya konektivitas yang memadai antara destinasi pariwisata yang ada. Meskipun memiliki potensi wisata yang menarik, akses yang terbatas antar destinasi tersebut menjadi kendala signifikan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi dan menikmati keindahan wilayah Tanjung Pinang dan Bintan secara menyeluruh. Permasalahan lain mungkin juga meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM yang terlatih di sektor pariwisata, atau bahkan perbedaan fokus dalam

mengembangkan destinasi wisata

##### **b. Aliran Kebijakan (*Stream of Policy*)**

Pemerintah daerah di Tanjung Pinang dan Bintan memainkan peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pariwisata. Mereka bekerja bersama dengan asosiasi pariwisata, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung implementasi kebijakan yang direncanakan

##### **c. Aliran Politik (*Stream of Politics*)**

Sisi politik, anggota DPRD provinsi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan terkait pariwisata di Tanjung Pinang dan Bintan. Mereka memiliki pengaruh dalam menyusun regulasi atau alokasi anggaran yang berkaitan dengan industri pariwisata. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki keterlibatan dalam kebijakan visa on arrival (VoA) yang memengaruhi arus wisatawan ke daerah ini.

Integrasi kebijakan di Tanjung Pinang dan Bintan, kolaborasi dan sinergi antara berbagai aktor merupakan kunci keberhasilan. Kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan lembaga legislatif merupakan fondasi dalam menyusun kebijakan yang berdampak positif bagi pengembangan industri pariwisata di wilayah ini. Dengan melihat setiap aliran teori Kingdon dalam konteks lokal, upaya kolaboratif semacam ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi serta membawa perubahan yang signifikan bagi pertumbuhan industri pariwisata di Tanjung Pinang dan Bintan.

2. Implementasi dan hambatan bottleneck proses integrasi kebijakan dan aksi untuk memajukan pariwisata

Melalui Sktor pariwisata terdapat serangkaian upaya yang telah dilakukan di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu strategi yang dijalankan adalah penyelenggaraan event dan pameran pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Partisipasi dalam program yang digagas oleh pemerintah pusat menjadi bagian dari langkah-langkah yang diadopsi. Namun, sejak pandemi COVID-19, promosi pariwisata ke luar negeri telah dibatasi oleh pemerintah pusat. Sebagai respons, kegiatan promosi dan pameran pariwisata lebih banyak dilaksanakan di dalam negeri. Slogan yang cukup populer yang diusung, khususnya oleh Bapak Sandiaga Uno, adalah "berwisata di Indonesia".

Langkah-langkah ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tersusun, dengan mengikuti program-program yang rutin diadakan. Sebagai contoh, partisipasi dalam event seperti Majapahit Travel Fair yang merupakan kegiatan tahunan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Selain itu, terdapat pula kegiatan seperti SATTE di India dan MATTA di Malaysia yang juga menjadi ajang promosi pariwisata secara berkala.

Hal ini mencerminkan komitmen dalam menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, dengan fokus pada peningkatan konektivitas antar destinasi, promosi yang kuat di tingkat nasional maupun internasional, serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Melalui ranah pariwisata, terlihat ada ketidakkonsistenan yang perlu diperhatikan dari perspektif Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Terutama terkait dengan fokus wisata di Lagoi yang seringkali tidak memberikan dampak yang sama pada kunjungan wisatawan ke Tanjung Pinang. Sebagian besar paket perjalanan atau tur wisata yang terkait dengan Lagoi cenderung memusatkan aktivitas di sana dengan penginapan, kegiatan berenang di perairan Lagoi, serta kesempatan untuk berbelanja oleh-oleh khas daerah tersebut. Namun, sering kali kurang memasukkan kunjungan wisata ke Tanjung Pinang dalam paket perjalanan tersebut.

Sebuah pendekatan yang lebih mengintegrasikan antara destinasi wisata menjadi diperlukan. Misalnya, dalam paket wisata, selain menawarkan pengalaman di Lagoi, juga diperluas dengan kunjungan ke Tanjung Pinang. Kunjungan ini bisa mencakup destinasi menarik seperti Pulau Penyengat, Patung Seribu, atau pagoda tertinggi di wilayah tersebut. Selain itu, tur tersebut dapat menawarkan pengalaman membeli oleh-oleh khas Tanjung Pinang, termasuk makanan khas dari pasar Intan atau produk kerajinan tangan lokal di Tanjung Pinang. Inisiatif semacam ini menjadi titik fokus penting bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan konektivitas antara dua wilayah utama yang berada di daratan, yaitu Bintan dan Tanjung Pinang. Memanfaatkan integrasi antara kedua destinasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pariwisata Kepulauan Riau secara keseluruhan.

**Tabel 4. Data Paket Wisata Tanjungpinang dan Bintan**

No	Paket wisata Tanjungpinang	No	Paket wisata Kabupaten Bintan
1.	Pengalaman membuat Tanjak	1.	Lagoy Bay
2.	Bentor Historical Tour Penyengat Island	2.	1 Day Treasure Bay
3.	Pengalaman Gurindam	3.	1 Day Tanjungpinang City
4.	Coocking class Penyengat Island	4.	1 Day White Sand Island
5.	Pengalaman Berbusana Tradisional Melayu	5.	1 Day Adventure
6.	Tur Literatur	6.	Honeymoon Paket
7.	DAY 01 : ARRIVAL – PULAU PENYENGAT – TANJUNG PINANG TOUR	7.	Snorkeling Paket

	(LD)		
8.	-	8.	Paket 2D1N/3D2N Hemat yaitu paket wisata ke Pulau Bintan mahal, disini kami menyediakan paket dengan harga murah tapi ingat loh bukan murahan
9.	-	9.	Paket 2D1N/3D2N yaitu Mengunjungi destinasi destinasi terbaik di Pulau Bintan yang kaya akan wisata baharinya.

(Sumber: Data diolah Penulis)

Berdasarkan Data Paket wisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan diatas dapat dilihat bahwa paket wisata di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih belum terkoneksi dengan baik dimana paket paket wisata yang ada di kabupaten Bintan masih belum terkoneksi sampai ke destinasi wisata kota Tanjungpinang begitupun sebaliknya. Hal ini merupakan kendala dalam konektivitas atau integrasi antara keduanya. Melalui kerja sama kebijakan dari masing masing pemangku kepentingan perlu melakukan peningkatan agar paket wisata tersebut dapat berjalan lebih lancar dan terkoneksi dengan baik. Hal tersebut melibatkan koordinasi antara pihak terkait, perbaikan infrastruktur, atau pengembangan strategi pemasaran paket wisata yang lebih terpadu.

Data menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan ke Lagoi tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan yang setara dalam jumlah wisatawan yang mengunjungi Tanjung Pinang. Hal ini menandakan bahwa ada potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam menghubungkan dua destinasi ini secara menyeluruh dalam paket perjalanan. Integrasi ini, jika dilakukan dengan baik, tidak hanya akan memberikan pengalaman wisata yang lebih kaya bagi pengunjung, tetapi juga akan memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah ini secara holistik. Pihak berwenang di Provinsi Kepulauan Riau perlu mempertimbangkan secara serius strategi yang lebih terintegrasi antara destinasi wisata utama mereka. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan minat wisatawan untuk menjelajahi destinasi yang berbeda di wilayah tersebut, memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata, serta memperluas daya tarik pariwisata Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Proses implementasi program pariwisata di Tanjungpinang saat ini masih dalam tahap pendahuluan yang berfokus pada mengidentifikasi permasalahan dan potensi wisata yang dimiliki. Tetapi, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Perubahan terus-menerus dalam sistem merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, Tanjungpinang menerapkan konsep CBT (*Community-Based Tourism*) yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Langkah awal ini untuk mengidentifikasi dan potensi wisata Tanjungpinang, yang melibatkan pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi, penguatan sektor kuliner, akomodasi, serta dukungan lainnya bagi para pelaku pariwisata. Keseluruhan program pariwisata di Tanjungpinang saat ini sedang berfokus pada upaya merangkul dan mendukung para pelaku wisata agar lebih diminati oleh pengunjung. Pendampingan terhadap pelaku pariwisata, penguatan Infrastruktur transporta, pengembangan kuliner, serta peningkatan kualitas layanan hotel menjadi prioritas dalam upaya menjadikan Tanjungpinang sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

### Policy Goals (Tujuan Kebijakan)

1. Pemerintah Tanjungpinang dan Bintan memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan industri kreatif di kota ini sebagai bagian dari upaya pembangunan dan diversifikasi ekonomi. Upaya ini melibatkan sejumlah strategi yang dirancang untuk memperkuat, mendukung, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif dalam berbagai sektor. Salah satu langkah strategis yang telah diterapkan oleh pemerintah Tanjungpinang dan Bintan

- adalah pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri kreatif. Kebijakan ini mencakup insentif pajak, pendanaan, serta fasilitas dan layanan dukungan bagi pelaku industri kreatif. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan dukungan finansial dan non-finansial ini bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis di sektor ini.
2. Selain itu, pemerintah Tanjungpinang dan Bintan juga aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antara pelaku industri kreatif, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis lainnya. Program-program kemitraan dan kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Pemerintah membuka ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara para pelaku industri kreatif, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, inisiatif pemerintah Tanjungpinang dan Bintan juga termasuk dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung industri kreatif.
  3. Program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan juga menjadi fokus pemerintah Tanjungpinang dan Bintan dalam mendukung industri kreatif.

### **Policy Instrument (Instrumen Kebijakan)**

Implementasi dan hambatan bottleneck proses integrasi kebijakan dan aksi untuk memajukan pariwisata dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, terdapat serangkaian upaya yang telah dilakukan di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu strategi yang dijalankan adalah penyelenggaraan event dan pameran pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Partisipasi dalam program yang digagas oleh pemerintah pusat menjadi bagian dari langkah-langkah yang diadopsi. Namun, sejak pandemi COVID-19, promosi pariwisata ke luar negeri telah dibatasi oleh pemerintah pusat. Sebagai respons, kegiatan promosi dan pameran pariwisata lebih banyak dilaksanakan di dalam negeri. Langkah-langkah ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tersusun, dengan mengikuti program-program yang rutin diadakan Untuk memajukan sektor pariwisata, terdapat tiga unsur utama yang menjadi fokus, dikenal sebagai 3A, yaitu Aksesibilitas, Amenity, dan Atraksi. (Darmawan, 2020). Produk wisata yang dikenal dengan 3 A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) merupakan suatu sistem, dimana satu sama lain saling berkaitan, dibutuhkan pengelolaan yang terpadu antar produk wisata yang tersedia.

Aksesibilitas berkaitan dengan konektivitas dan transportasi menuju destinasi wisata. Kemudian, Amenity meliputi fasilitas akomodasi, restoran, dan sanitasi yang harus terpenuhi dalam destinasi pariwisata. Sedangkan, Atraksi berfokus pada event-event yang menarik pengunjung. Kepulauan Riau (Kepri) memiliki permasalahan signifikan terkait dengan konektivitas, mengingat wilayahnya yang terdiri dari 2.480 pulau. Oleh karena itu, Keterbatasan kapal yang memadai untuk menghubungkan pulau-pulau ini menjadi kendala utama, yang menghambat kemajuan sektor pariwisata di Kepri. Atraksi atau daya tarik wisata juga menjadi fokus, tetapi Kepri masih belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mendukung seperti di Bali atau Yogyakarta. Meskipun demikian, upaya pengembangan event-event pariwisata sudah dilakukan dengan cukup baik, termasuk kehadiran Kharisma event Nusantara sebagai bagian dari kalender acara tahunan yang juga menjadi event nasional. Sementara itu Kepri merupakan provinsi kedua dengan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 8 entry point yang merupakan pintu masuk wisatawan melalui seaport.

### **KESIMPULAN**

Pengembangan kebijakan pariwisata di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan, tampaknya mengalami sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian mendalam. Meskipun terdapat keterlibatan yang cukup dari berbagai sektor seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, asosiasi pariwisata, komunitas, dan media di Tanjungpinang dan Bintan dan



Bintan, koordinasi antara pihak-pihak ini masih belum mencapai tingkat yang memadai untuk memastikan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di kedua wilayah tersebut. Permasalahan yang muncul dalam kerangka multi sector policy di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan adalah divergensi kebijakan antar kabupaten/kota yang berdampak langsung pada kemampuan pengambilan keputusan di tingkat provinsi, serta kesiapan untuk melakukan intervensi. Fenomena ini menandakan bahwa prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan pada setiap entitas lokal untuk mengatur urusan lokalnya sendiri, menjadi hambatan dalam upaya menyelaraskan visi dan strategi pengembangan pariwisata secara komprehensif di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan. Keterlibatan sektor swasta dalam investasi infrastruktur pariwisata, sementara pentingnya regulasi dari pemerintah dalam pembentukan landasan kebijakan, menimbulkan tantangan koordinasi yang rumit di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan.

Upaya untuk menghadapi tantangan kompleks ini, perlu adanya pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan. Pendekatan multi sector policy harus diperkuat dengan dialog yang intensif, kerjasama yang erat, serta kesadaran bersama akan tujuan akhir dari pengembangan industri pariwisata di kedua wilayah tersebut. Hanya dengan demikian, penyelesaian masalah dan pengembangan kebijakan yang holistik dan terpadu dapat tercapai, sehingga industri pariwisata Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *Indikator Utama Provinsi Kepulauan Riau 2022*. 1–92.
- Peters, B. G. (2018). Governance, Innovation, and Policy Integration: *The Challenge of Complexity*. *Policy Review*, (125), 1-14.
- Candel, J. J. L., & Biesbroek, R. (2016). Toward A Processual Understanding Of Policy Integration. *Policy Sciences*, 49(3), 211–231. <https://doi.org/10.1007/S11077-016-9248-Y>
- Cejudo, G., & Michel, C. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. *SAGE Open*, 11(1), 215824402110321. <https://doi.org/10.1177/21582440211032161>
- Darmawan. (2020). Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Government*, 2(2), 132-146.
- Dwiputra, R. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam Erupsi Merapi. *Journal of Regional and City Planning*, 24(1), 35. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.1.3>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kalebos, F. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem*, 4, 489–502.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474.
- Suryani, A. I. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. *Jurnal Spasial*, 3(1). <https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595>
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28-38.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman.

- Muhammad, H. S. (2020). *Strategi Promosi Dan Pemasaran Online Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Timur Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Lombok Timur* (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2008
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Pasal 8 Pasal 87 ayat (1) Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan. (2013). 1–4.
- Perda Kota Tanjungpinang No. 08 Tahun 2021. (2022).
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
- Puradinata, E. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 223-241.
- Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Media.
- RPJMD Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
- Safitri, K. (2021). Sandiaga Uno: Ekonomi Kreatif Indonesia Masuk 3 Besar di Dunia. Kompas.com. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/08/12/154311726/sandiaga-unoekonomi-kreatif-indonesia-masuk-3besar-di-dunia>
- Sumastawa, L. (2016). *Pemasaran paket wisata dengan metode personal selling pt. bandara mega persada malang*. Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo, S., Rusmana, O., Zuhelfa, Z., & Muslim, S. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 1(2), 93-99.